OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DESA (Study pada Pengelolaan Dana Desa)

Titi Darmi¹

Received Article: 4 Agustus 2016

Accepted Article: 10 November 2016

Abstract

The third Nawa Cita of Presiden Jokowi is build Indonesia on the outskirts, it is meaningful that national development focused on villages oriented throughout Indonesia, so that Indonesian villages become self-sufficient village and competitiveness. Nawa cita is an orientation of the national development planning 2015 -2019. The government has budgeted rural development on average earn 800 - 1M rupiahs for every village in accordance with the Act mandates. Based on the findings of the Corruption Eradication Commission of RI occur irregularities in the management of the Village Fund (Dana Desa/DD), including the use of DD does not correspond to the needs of the community. DD management principle is transparent and accomodate public participation, however it has not been made by manager DD. Women's participation and transparency for the public should be rise the public trust in the village officials in managing the funds of the village, however it never been taken. Role of women in planning the work program of the village called APBDes, can filter aspirations in accordance with the needs of society based on values, norms and culture. By optimizing the women role can capture the aspirations of society and openness in the management of the fund that all can be used as social capital village to village governance in the management of DD. Social capital will make the villagers and village officials have a strong bond, mutual trust, to avoid a conflict so as a valuable capital to build and boost the economy in the village.

Keywords : woman's role, social capital, village fund (Dana Desa/DD) management.

Abstrak

Nawa Cita ketiga Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, hal tersebut bermakna bahwa pembangunan nasional difokuskan kepada pembangunan desa-desa. Nawa cita sebagai sebuah orientasi sasaran pembangunan yang strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamanatkan sasaran pembanguan desa dengan cara meningkatkan jumlah desa mandiri. Pemerintah memiliki anggaran pembangunan desa rata-rata antara 800 juta sampai 1 milyar rupiah setiap 1 desa berdasarkan kepada amanat Undang-Undang. Berdasarkan kepada temuan KPK RI bahwa banyak ditemukan permasalahan pengelolaan Dana Desa, yaitu: penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa secara prinsipnya adalah terbuka dan mengakomodasi semua partisipasi masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh pengelola dana desa tersebut. Partisipasi perempuan dan keterbukaan kepada masyarakat seharusnya menjadi suatu kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa akan tetapi tidak pernah terjadi. Peranan para perempuan dalam merencanakan pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa, dapat menampung aspirasi-aspirasi mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma dan budaya. Melalui optimisasi peranan perempuan dapat melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa yang kesemuanya dapat digunakan sebagai kapital sosial desa menuju pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan Dana Desa. Kapital sosial menjadikan warga desa dan pemerintah desa kuat dan memiliki kepercayaan bersama untuk menghindari konflik sehingga sebagai sebuah kesatuan untuk membangun perekonomian desa tersebut.

Kata kunci: peranan perempuan, kapital sosial, Pengelolaan Dana Desa

¹ Penulis adalah Dosen tetap Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu

A. Pendahuluan

Istilah “Tikus mati di lubang padi” dan pembangunan desa yang terlupakan, tidak akan terjadi dengan terbitnya Undang - Undang (UU) Desa, merupakan kebijakan kijasana pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga desa (masyarakat) memiliki daya saing. Hal ini, sejalan dengan Visi Misi Nawacita Presiden Jokowi bahwa membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Itu artinya, pembangunan pedesaan tujuan utama pembangunan Nasional karena memiliki sasaran yang strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamanatkan sasaran pembangunan desa dengan cara meningkatkan jumlah desa mandiri¹.

Komitmen untuk menerapkan UU tersebut, ditunjukkan pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar, tercatat pada tahun 2015 dana desa dialokasikan dan terealisasi sebesar 20,76 triliun dan pada tahun 2016 ini, pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa sebesar 46,98 triliun, diperuntukan lebih kurang 74.093 desa, kalaulah dibagi rata per desa, desa akan mendapat anggaran lebih kurang 600 juta rupiah sampai 800 juta rupiah setiap desa². Dalam pengalokasian besarnya dana desa yang diterima setiap desa berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa tertuang dalam RPJMDes, RKPDDes dan APBDes. Kebijakan pengalokasian Dana Desa (DD) sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini, yang membuat desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa

kemudian identik dengan keterbelakangan, kapasitas sumberdaya manusia yang rendah, penduduk usia renta. Dengan adanya pengalokasian DD merupakan harapan masyarakat desa, sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang tertuang dalam APBDes.

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak ditemukan permasalahan pengelolaan DD, yaitu: 1) UU Desa dan regulasi pendukung belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholder; 2) masih tingginya potensi korupsi di daerah; 3) desa relatif mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan kantung suara pada saat pilkada dan pemilu; 4) partisipasi, akuntabilitas dan transparansi masih rendah³. Masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat⁴. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurang komunikasi dari pemerintahan desa kepada masyarakatnya. Padahal, amanat UU mengatakan bahwa penggunaan dana desa dalam menentukan program pembangunan kerja desa berdasarkan partisipasi masyarakat, artinya masyarakat dilibatkan terutama kaum perempuan dalam membuat program kerja, agar program kerja yang ditetapkan dalam APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa didasarkan dengan partisipasi masyarakat dipercaya akan menimbulkan rasa memiliki. Keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa, dengan menggunakan anggaran dana desa, sebagai upaya menumbuhkan rasa memiliki ("sense of ownership" atau "sense of belonging"), rasa memiliki bagian dari unsur modal sosial, terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainability).

Masih ada paradigma sebagian masyarakat dan pemerintah, yang belum menyadari bahwa ada ketimpangan relasi Gender yang berbasis kekuasaan yang berlangsung sekarang ini. Di lihat dari kesenjangan status pekerjaan utama. Persentase perempuan sebagai pekerja

keluarga mencapai hampir 29 persen dari semua perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari persentase laki-laki yang hanya 6 persen. Hal ini menunjukkan persentase perempuan yang bekerja namun tidak mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki⁵. Hal ini berdampak pada semakin kecilnya peran dan fungsi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kualitas hidup perempuan tidak menjadi lebih baik dan jumlah perempuan miskin semakin bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di Lingkungan Asean Indeks Pembangunan Gender (IPG) masuk kategori rendah menduduki peringkat ke 3 terbawah dari negara-negara Asean. Padahal, potensi jumlah penduduk perempuan usia subur pada tahun 2014 sebesar lebih dari 60 juta, atau lebih dari 50 persen jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia 15 – 16 tahun, mencapai 85 juta, atau sekitar 67 persen dari penduduk perempuan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan. Jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, maka akan menjadi beban ekonomi bagi bangsa Indonesia⁵.

Dalam rangka pembangunan Indonesia secara umum, Desa khususnya, pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin, tanpa membedakan status sosial untuk melaksanakan sesuai perannya. Terutama perempuan dapat berperan dan ikut serta dalam merencanakan pembangunan desa dengan menggunakan anggaran dana desa. Salah satu pendekatan yang tepat adalah pemerintahan Desa melakukan transparansi dan mengikutsertakan perempuan setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penulis melihat masih ada gap dan belum ada kesetaraan peran, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dana desa. Banyak kajian yang menyatakan pentingnya modal sosial^{6, 7, 8, 9} dan¹⁰ agar kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud, akan timbul rasa memiliki, rasa percaya antara masyarakat dengan pengelola dana desa sesuai dengan norma,

nilai dan budaya sosial masyarakat setempat.

Sementara penelitian yang membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya di Pedesaan akan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap suksesnya program yang telah ditentukan^{11, 12, 13, 14, 15} dan¹² optimalisasi peran perempuan menjadi solusi agar dalam merencanakan pengelolaan dana desa untuk pembangunan dapat berjalan maksimal, sehingga mandat UU Desa dan Nawa Cita ke tiga Presiden RI dapat terwujud dengan menjadikan desa-desa mandiri dan memiliki daya saing.

B. Peran Perempuan di Sektor Pemerintahan Desa

Setiap pembangunan seyogyanya melibatkan kaum perempuan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan peran perempuan Indonesia. Implementasi PUG disampaikan kepada Departemen maupun Lembaga Pemerintah dan non Departemen serta Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia, untuk menjalankan pengurusan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut selayaknya, kiprah perempuan dalam setiap perencanaan pembuatan program pembangunan desa dengan alokasi Dana Desa dapat menjadi pedoman bagi setiap Pemerintahan Desa untuk melibatkan para perempuan.

Berdasarkan data BPS¹⁶ keterlibatan perempuan di sektor Pemerintahan Desa di lihat dari kesetaraan Gender sangat rendah, dari 78.736 kuota Kepala Desa hanya 4.485 orang Kepala Desa nerjenis kelamin perempuan atau kiprah perempuan hanya 5,70%, sementara untuk Sekretaris Desa dari 70.780 kuota, Sekretaris Desa dari perempuan hanya 7.156 orang atau lebih kurang 10,1%, (baca tabel 1). Ini artinya peran perempuan di sektor Pemerintahan Desa masih sangat rendah,

walaupun perempuan diberikan porsi 30% sesuai perundang-undangan, sangat disayangkan peluang tersebut belum diambil oleh kaum perempuan. Rendahnya kesetaraan Gender disebabkan beberapa faktor diantaranya karena faktor sosial, budaya dan tradisi yang dianut oleh warga desa serta kebijakan, regulasi dan program kerja belum konsisten terhadap gender. Isu bahwa kaum

perempuan berpartisipasi dalam urusan rumah tangga sedangkan dalam hal isu-isu sosial kemasyarakatan menjadi persoalan kaum pria. Sehingga berimplikasi pada kurangnya kiprah perempuan baik keterlibatan perempuan untuk jabatan di pemerintahan Desa maupun keterlibatan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Tabel 1. Jumlah Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Provinsi	Kepala Desa		Jumlah	Sekretaris Desa		Jumlah		
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan			
	(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
Aceh		6212	32	6244		5456	101	5557
Sumatera Utara		5458	319	5777		4640	971	5611
Sumatera Barat		1045	66	1111		688	317	1005
Riau		1635	43	1678		1524	124	1648
Jambi		1467	47	1514		1260	92	1352
Sumatera Selatan		2854	182	3036		2541	309	2850
Bengkulu		1413	69	1482		1274	130	1404
Lampung		2422	142	2564		2098	131	2229
Bangka Belitung		338	19	357		235	80	315
Kepulauan Riau		372	24	396		224	37	261
DKI Jakarta		207	60	267			56	260
Jawa Barat		5390	367	5757		4753	382	5135
Jawa Tengah		7604	703	8307		5951	781	6732
DI Yogyakarta		376	36	412		331	56	387
Jawa Timur		7343	780	8123		6011	572	6583
Banten		1221	57	1278		1416	83	1499
Bali		671	14	685		623	60	683
NTB		1117	14	1131		966	37	1003
NTT		2975	127	3102		2342	242	2584
Kalimantan Barat		1976	62	2038		1578	152	1730
Kalimantan Tengah		1452	71	1523		1287	108	1395
Kalimantan Selatan		1894	70	1964		1485	134	1619
Kalimantan Timur		952	39	991		808	110	918
Kalimantan Utara		457	12	469		413	29	442
Sulawesi Utara		1511	313	1824		1283	416	1699
Sulawesi Tengah		1835	84	1919		1718	151	1869
Sulawesi Selatan		2687	307	2994		2012	598	2610
Sulawesi Tenggara		1898	149	2047		1793	262	2055
Gorontalo		629	86	715		356	273	629
Sulawesi Barat		609	17	626		510	59	569
Maluku		842	39	881		906	71	977
Maluku Utara		1131	34	1165		1012	85	1097
Papua Barat		1517	26	1543		1405	68	1473
Papua		4741	75	4816		4521	79	4600
Indonesia		74251	4485	78736		63624	7156	70780

Sumber: Potensi Desa 2014, BPS (2014)

Isu tersebut terkonfirmasi dengan kondisi perempuan pedesaan Indonesia pada umumnya masih termarginalisasi, seperti faktor yang diuraikan di atas, faktor yang sehari-hari dialami perempuan pedesaan adalah 1) beratnya beban kerja dan panjangnya waktu kerja perempuan selain mengurus urusan rumah tangga, perempuan sangat tinggi berkontribusi atas keuangan keluarga; 2) masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dari pada laki-laki pada tahapan proses dan pelaksanaan pembangunan Desa; 3) masih rendahnya peluang untuk meningkatkan kapasitas diri, misalnya masih ada sebagian masyarakat pedesaan yang beranggapan anak laki-laki lebih diutamakan. Perempuan masih terkesan di nomor duakan, lihat di kegiatan PKK, Dasa wisma, Pos yandu, kelompok pengajian, arisan dan lain-lain, kegiatan tersebut masih bergelut diseperti masak memasak, jahit menjahit, dan urusan rumah tangga.

Isu tersebut berimplikasi pada kiprah perempuan di berbagai sektor, ini terjadi di negara berkembang pada umumnya masih terjadi ketidaksetaraan gender, penelitian¹⁷ dan¹⁸ mengatakan perusahaan memilih perempuan karena standar upah yang lebih rendah dari laki-laki. Sementara penelitian¹⁹ dilakukan pada perusahaan jasa dan manufaktur/ritel di 87 negara berkembang, jumlah manajer puncak perempuan tinggi pada perusahaan di bidang jasa dari pada di bidang manufaktur, argumen yang diberikan karena perusahaan ritel tidak memerlukan keahlian teknis. Dari hasil penelitian di atas dapat diambil hal positif, bahwa perempuan dominan pada bidang jasa. Bidang jasa banyak tantangan dan permasalahan yang datang tiba-tiba, perlu inovasi dan kreatifitas yang tinggi, perempuan memiliki potensi dan memiliki kecerdasan mencari solusi serta kecerdasan bertahan dalam setiap permasalahan hidup yang dialami. Perempuan ternyata lebih ulet, lebih sabar, lebih tekun dan tetap istiqomah dalam upaya memperbaiki kualitas hidup bagi keluarganya.

Penerapan UU Desa, yang mengalokasikan DD lebih kurang 800 juta per desa menjadi peluang bagi kaum perempuan dalam merencanakan program pembangunan dengan mengintegrasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Maka tidak ada alasan bagi aparat desa untuk tidak melibatkan perempuan dalam setiap program pembangunan. Perempuan dituntut untuk berpartisipasi agar pengelolaan DD, dapat bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Agar optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan Dana Desa, perlu langkah kongkrit dan komitmen bersama semua stakeholder dimulai dengan memperkuat kelembagaan kewanitaan di Desa (PKK, posyandu, dasawisma dan lain-lain) membuat jaringan-jaringan individu dan kelompok, jaringan tersebut bisa informal maupun formal, jaringan ini sebagai modal sosial akan membantu setiap permasalahan yang dihadapi perempuan. Penguatan kapasitas kelembagaan kewanitaan sebagai organisasi dan meningkatkan kapasitas individu sebagai individu dengan cara belajar, belajar dan belajar. Dalam pengelolaan Dana Desa peran perempuan sangat dibutuhkan agar Dana Desa dapat dikelola sesuai dengan aspirasi perempuan, diharapkan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat desa.

C. Modal Sosial dan Pengelolaan Dana Desa

Modal sosial adalah seperangkat daya dalam membangun hubungan-hubungan sosial, membangun jaringan, membentuk komunitas, membangun organisasi, yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Modal sosial didefinisikan oleh Fukuyama sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka⁶. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan ada tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. Dampak modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa: 1) dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif; 2) menimbulkan produk dari norma-norma sosial kooperatif yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial; 3) *Trust* bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal

karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya; 4) tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu; 5) akan terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu bersedia mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Bisa saja terjadi *low-trust* dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya. Jika *low-trust* terjadi dalam suatu masyarakat, maka campur tangan negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan⁶. Oleh karena itu, modal sosial yang kita miliki harus kita maksimalkan, karena modal sosial itu membangun koneksi, menghindari isolasi, dan dapat mempermudah pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimulai dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Terbitnya UU tersebut babak baru perubahan yang sangat mendasar mengarah pada reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Meliputi tuntutan kepada Pemda untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat.

Selain UU di atas ada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan alokasi keuangan yang diperuntukan pembangunan pedesaan, yang langsung dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan partisipasi masyarakat. Lebih detail ditegaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Dalam konteks pengelolaan DD, penerapan azas transparansi dan partisipasi tersebut, dibutuhkan modal sosial, agar timbul saling percaya antara masyarakat dengan pengelola DD, pengelolaan DD dalam hal ini diwakili oleh aparatur desa,

mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dengan cara melakukan musyawarah desa terutama mengajak kaum perempuan dalam Musrembangdes, setiap program pembangunan desa yang tertuang dalam APBDDes, sesuai nilai dan norma serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan DD peran perempuan ditempatkan sebagai subjek bukan objek, menggunakan pendekatan *Gender And Development (GAD)*, perempuan menjadi agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola jaringan kesetaraan gender. Dalam pengelolaan DD, semua stakeholder penting memiliki persepsi bahwa kemitraan, kesejajaran antara perempuan dan laki-laki dengan mengutamakan persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, imbalan kerja (upah) yang sama, kesempatan yang sama, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

D. Kesimpulan

Secara umum ketidaksetaraan gender masih terjadi negara-negara berkembang, begitupun di Indonesia terutama pada masyarakat Desa. Rendahnya kiprah perempuan pada sektor pemerintahan Desa berimplikasi, rendahnya peran perempuan dalam pembangunan desa terutama pengelolaan keuangan DD. Faktor penyebab adalah 1) kebijakan/regulasi provinsi/kabupaten belum mengintegrasikan kesetaraan gender disetiap program kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 bahwa sasaran pembangunan kedua diprioritaskan kepada keadilan gender; 2) masih sebagian masyarakat memiliki persepsi memposisikan perempuan hanya pada urusan rumah tangga, sementara laki-laki lebih layak diposisikan pada sektor publik; 3) masih rendahnya kapasitas kelembagaan PKK, Posyandu, Dasawisma dan lain lain sebagai organisasi yang menaungi para perempuan dan masih rendah kapasitas individu kaum perempuan.

Rekomendasi urgent dilakukan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kapasitas organisasi kelembagaan kewanitaan dan individu kaum perempuan (meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam segala aspek) sebagai sumberdaya yang potensial dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

1. Darmi T. Indonesia Dalam Menghadapi MEA Dalam Perspektif Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa. 2015:169
2. KemenKeu. Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Desa. 2016:1-7
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731>. June 2015
4. A y u K u s u m a s t u t i. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Masy J Sociol*. 20 Nomor 1:81-97.
5. BPS RI. Indeks Pembangunan Gender 2014. 2015.
6. Francis Fukuyama. *Social Capital and Civil Society*.; 2000.
7. Lockhart WH. Building Bridges and Bonds: Generating Social Capital in Secular and Faith-Based Poverty-to-Work Programs. *Sociol Relig*. 2005;6 Nomor 1:45-60. ProQuest.
8. Lijun Song. Social Capital and Psychological Distress. *J Health Soc Behav*. 2010;52(4):478-492. doi:10.1177/0022146511411921.
9. Dominiak.et.al J. Social capital in the Pozna agglomeration. *Bull Geogr Socio-economic Ser*. 2012;18:5-14.
10. Geeke Waverijn.et.al. A prospective analysis of the effect of neighbourhood and individual social capital on changes in self-rated health of people with chronic illness. *BMC Public Health*. 2014;14:675. <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/675>.
11. Otniel Pontoh. Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Miahahasa Utara. *J Perikan dan Kelaut Trop*. 2010;VI(3).
12. Suwandi. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KANTOR DESA SUKA DAMAI KECAMATAN MUARA BADA K KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *eJournal Adm Negara*. 2015;3(4):1183-1194. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
13. I Wayan Saputra. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jur Pendidik Ekon*. 2016;6 Nomor 1.
14. Hariany Idris. ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *J Birokrat Ilmu Adm Publik*. 2014;1 Nomor 2:15-22.
15. Ni Kadek Darmiasih, Ni Luh Gd Erni Sulindawati NASD. ANALISIS MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). *e-journal S1 Ak Univ Pendidik Ganesha Jur Akunt Progr S1*. 2015;1 Nomor 2.
16. BPS RI. *Statistik Politik 2014*. Jakarta; 2014. <https://www.bps.go.id>.
17. Seguino S. Gender Inequality and Economic Growth: A Cross - Country Analysis. *World Dev*. 2000;28(7):1211-1230. doi:10.1016/S0305-750X(00)00018-8.
18. Grotti R, Scherer S. Does gender equality increase economic inequality? Evidence from five countries. *Res Soc Stratif Mobil*. 2016;45:13-26. doi:10.1016/j.rssm.2016.06.001.
19. Amin M, Islam A. Are there more female managers in the retail sector? Evidence from survey data in developing countries. *J Appl Econ*. 2014;17(2):213-228. doi:10.1016/S1514-0326(14)60010-6